

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pemerintah atau publik adalah perusahaan yang memberikan hasil berupa jasa pelayanan yang sifatnya langsung maupun tidak langsung agar masyarakat bisa menikmatinya (Halim et al., 2010:29). Transparansi merupakan tugas dari pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dari kegiatan yang telah dilakukan (Dewi et al., 2020). Tujuan dari pemerintah dalam suatu negara yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya (Sedianingsih et al., 2020).

Tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah sekarang dalam menyediakan pelayanan publik lebih besar yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat (Fatimah & Indrayani, 2019). Wewenang tersebut dapat bersumber dari pendapatan bagi daerah (*money follow function*) termasuk dana, tugas, dan tanggung jawab (Fries et al., 2012). Menurut Dewi, (2020) pengimplementasian kebijakan daerah dapat melalui berbagai kekuatan yaitu hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, gambaran dari struktur Pemerintah Daerah, pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah, serta hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, menjelaskan bahwa keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan

perencanaan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang (Mahendra et al., 2020). Pengelolaan keuangan daerah dapat berupa kegiatan-kegiatan termasuk merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu untuk menyampaikan laporan daerah, termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Pusat (Halim et al., 2010:10). Hal tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang dapat dilaksanakan dengan dengan baik dan benar. SAKD terdapat beberapa prosedur mulai dari mengidentifikasi transaksi, pencatatan jurnal, *posting* buku besar, menyusun neraca saldo sampai dengan penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Sedianingsih et al., 2020). Hasil dari SAKD tersebut perlu diaplikasikan kepada masyarakat dan *outputnya* berguna untuk mengembangkan kebijakan daerah dalam hal perencanaan, pengimplementasian, dan pelaporan (Awasthy & Mishra, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah unsur pokok kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah baik dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Yabbar & Hamzah, 2015:76). Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menetapkan ketentuan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013 tentang pengimplementasian akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah (Najiati et al., 2017). Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Ogoja & Osadi, 2019). Adanya sistem yang nyaman dan mudah diakses, pengelolaan sistem yang cepat, eror sistem muda diperbaiki, informasi yang lengkap dan akurat dapat

membantu pihak internal dan eksternal dalam mengambil keputusan (Baridwan, 2012).

Menurut BPK laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan “Standar Akuntansi Pemerintah”. BPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam laporan No. 53.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019 dan No. 53.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 16 Mei 2019. Kewajaran laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tidak lepas dari kinerja dari pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terutama pada BPKAD Pemkab Bojonegoro. BPKAD Pemkab Bojonegoro sebagai pengelola keuangan daerah mampu mengelola dengan baik sehingga berkali-kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian “WTP”.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dapat memberikan kemudahan bagi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan manfaat untuk mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan kepada masyarakat yang didukung oleh aspek keperilakuan dalam organisasi (Latifa & Sabeni, 2007). Akuntansi keperilakuan berperan di balik akuntansi tradisional berupa pengumpulan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan bahwa akuntansi dapat diukur dengan perilaku manusia (Lubis, 2010:20). Hal

tersebut dapat menggambarkan hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi, cerminan dari akuntansi keperilakuan juga dapat dilihat pada dimensi sosial dan budaya manusia dalam sebuah organisasi (Supriyono, 2018:7).

Pada sebuah organisasi, anggotanya mempunyai peran masing-masing yang berguna untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tujuan tersebut dapat menunjukkan sebuah hasil yang harus dipenuhi dalam jangka pendek maupun jangka panjang guna mewujudkan visi dan misi dalam organisasi (Lubis, 2010:49). Peran anggota dalam organisasi bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab anggota atas pencapaian tujuan organisasi yang diberikan (Clune & O'Dwyer, 2020). Rasa tanggung jawab tersebut dalam organisasi dinilai dalam bentuk imbalan tertentu (Dewi et al., 2020). Anggota organisasi berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan terbaginya berbagai tugas atau kegiatan dan tanggung jawab sesuai dengan kinerja yang dimiliki anggota tersebut (Lubis, 2010:107). Keseimbangan tujuan (*goal congruence*) antara individu dan organisasi dibutuhkan untuk mewujudkan sinergisme antara individu dan organisasi (Supriyono, 2018:94).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah meraih sebagai WTP atas laporan keuangan dari BPK dan kinerja yang baik dari pengelola keuangan daerah. Hal ini juga tidak lepas dari elemen sistem akuntansi sebagai komponen utamanya, karena di setiap aktivitasnya terdapat proses *output* dan *input*. Sistem akuntansi keuangan daerah yang ada di Pemkab Bojonegoro tepatnya di kantor BPKAD sudah efektif dan efisien serta layak unsur pengendalian untuk meminimalisir terjadinya resiko yang memberatkan seperti kecurangan. Adanya sistem akuntansi daerah aspek perilaku dari psikologi dan psikologi sosial yang

dikhususkan pada sikap, motivasi, emosi, persepsi, dan kepribadian pegawai yang ada di instansi tersebut berkaitan dengan sistem akuntansi daerah yang dirasa perlu untuk diteliti lebih dalam untuk mengendalikan risiko dan memperbaiki laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Mogontha et al., 2017)

Setiap instansi pemerintah memiliki sikap atau perilaku yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang menjadi pekerjaannya atau jabatannya (Oktaviani et al., 2020). Faktor perilaku pada pegawai terlihat pada tanggung jawab atau akuntabilitasnya (Kusuma Sari et al., 2015:45). Kinerja dari sebuah organisasi akan nampak pada tingkat kinerja kelompok dalam organisasi, sehingga tidak hanya berhubungan dengan individu saja (Dewi et al., 2020). Keperilakuan organisasi dilandaskan pada ilmu perilaku yang bersangkutan, yang fokus pada perilaku manusia dalam berorganisasi (Awasthy & Mishra, 2018). Dengan demikian, perilaku organisasi memiliki kerangka teori yang telah didukung oleh komponen-komponen pokok lain seperti perilaku dari individu itu sendiri dan memiliki organisasi formal untuk mewujudkan perilaku (Hakiki, 2018:3).

Akuntansi keperilakuan memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas dalam sebuah perusahaan (Supriyono, 2018:261). Kasmir, (2016:189) mengungkapkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu pengetahuan, kemampuan atau *skill*, kepribadian, rancangan kerja, budaya organisasi, motivasi kerja, pola kepemimpinan, kepuasan kerja, loyalitas kerja, komitmen, dan disiplin kerja. Aspek keperilakuan dari yang diungkapkan oleh Lubis, (2010:78) dari sisi psikologi dan psikologi sosial terdiri dari sikap, motivasi, emosi, persepsi, nilai, pembelajaran, dan kepribadian. Hubungan antara akuntansi keperilakuan dari aspek psikologi dan psikologi sosial dan akuntabilitas memiliki berbagai faktor

yang tentunya sulit diungkapkan. Akuntabilitas pegawai yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi bahkan mempengaruhi aturan formal berlaku melalui aspek dalam akuntabilitas keperilakuan (Kusuma Sari et al., 2015:9).

Theory of Planned Behavior (TPB) mengungkapkan bahwa niat berperilaku akan menentukan perilaku seseorang (Ajzen, 1991). Ajzen sebagai orang yang telah mengembangkan teori tersebut mengemukakan bahwa terdapat tiga macam hal yang mengarah pada tindakan manusia yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Ketiga hal kepercayaan tersebut dapat menentukan keyakinan individu dalam berperilaku. Sehingga sikap, motivasi, emosi, persepsi, dan kepribadian sebagai aspek keperilakuan organisasi dapat dinilai berdasarkan ketiga kepercayaan tersebut (Ngo et al., 2019).

Sikap merupakan respon positif atau negatif dari perasaan antara suka atau tidak suka terhadap suatu objek atau pekerjaan untuk memperoleh hal yang diinginkan (Marantika et al., 2016). Sikap yang efektif bermula pada diri sendiri yang dapat menanggapi sebuah peristiwa yang dialaminya (Kurniyanti & Tingkas, 2019). Jika seorang pegawai giat dan tekun dalam pekerjaannya maka akan merespon pekerjaannya dengan bersikap baik serta dapat menghasilkan sistem keuangan akuntansi daerah yang relevan dan andal. Terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al., (2020), Kurniyanti & Tingkas, (2019), (Purnama & Azizah, 2019), dan Marantika et al., (2016) bahwa secara signifikan sikap mempunyai hubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa individu akan memiliki sikap yang berubah-ubah sesuai dengan objek yang dilihatnya.

Menurut Lubis, (2010:84) motivasi merupakan sebuah konsep yang dapat membentuk perilaku seseorang karena efektifitas organisasionalnya. (Goleman, 2001:265) Motivasi dapat menjadikan seseorang memiliki semangat dan giat dalam bekerja dan mencapai tujuan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal tersebut motivasi yang baik untuk pegawai di instansi daerah akan memperoleh sebuah informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Terbukti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Oktaviani et al., (2020) dan Kurniyanti & Tingkas, (2019) bahwa secara signifikan motivasi mempunyai hubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan kondisi motivasi sangat tinggi dan kecenderungan tingkat pencapaian kinerja pegawai juga tinggi. Pegawai akan berusaha bekerja dengan semangat dan giat dalam mengerjakan tugas pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan, jika pegawai tersebut memiliki tingkat motivasi yang tinggi (Bondan S. et al., 2017).

Emosi adalah pengalaman sadar atau sebuah ekspresi perilaku seseorang yang melibatkan sebuah perasaan (Ngo et al., 2019). Setiap emosi, yang berawal dari marah, sedih, maupun gembira mempunyai perubahan fisik yang terlihat berbeda ((Kurniyanti & Tingkas, 2019). Perubahan tersebut dapat terlihat pada pola pernafasan, keringat, ekspresi wajah, denyut jantung, maupun respon lainnya yang berdampak pada sistem akuntansi keuangan daerah (Oktaviani et al., 2020). Terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Ngo et al., (2019) dan Kurniyanti & Tingkas, (2019) bahwa emosi memiliki hubungan erat dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa emosi dari seorang pegawai yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, sehingga dapat mempengaruhi sistem akuntansi keuangan.

Persepsi merupakan proses menerima informasi dengan tujuan untuk dapat mendefinisikan tentang apa yang telah diketahuinya (Wibowo, 2014:59). Hal tersebut menjadi pertimbangan bagaimana cara menginterpretasikan dan mengkategorikan sebuah informasi yang didapat untuk menjadi sebuah acuan pengetahuan (Mogontha et al., 2017). Objek yang sama dapat menjadi sebuah pembeda dari berbagai persepsi individu dengan individu yang lain. Sehingga objek tersebut memiliki berbagai pandangan dan arti yang berbeda. (Lubis, 2010:94). Persepsi yang berbeda dari setiap individu dapat mempengaruhi suatu sistem akuntansi keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mogontha et al., (2017) dan (Kurniyanti & Tingkas, 2019) juga menunjukkan bahwa persepsi memiliki hubungan yang erat dengan sistem akuntansi keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mogontha et al., (2017) yaitu “Analisis Pengaruh Aspek Keperilakuan Terhadap Sistem Akuntansi (Studi Kasus pada PT. Sinar Galesong Prima Di Manado)”. Penelitian yang dilakukan oleh Mogontha et al., (2017) terdapat 4 (empat) variabel independen yaitu variabel sikap, motivasi, emosi, dan persepsi. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen kepribadian. Kepribadian merupakan salah satu faktor terpenting untuk menentukan bagaimana pola pikir, pola rasa, dan pola perilaku seseorang dalam menghadapi situasi yang berbeda (Sya’baniah et al., 2019).

Penambahan variabel kepribadian pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja pegawai karena penelitian yang dilakukan oleh Sya’baniah., et al (2019) menyatakan bahwa kepribadian seseorang dapat menghambat visi dan misi dalam sebuah organisasi. Adanya kepribadian yang baik dari pegawai

pemerintah, maka dapat mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik pula. Hal tersebut menurut peneliti, sangat penting untuk mengetahui pengaruh kepribadian terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki visi dan misi yang bisa dilihat pada www.bpkad.bojonegorokab.go.id/pages. Visi dan misi tersebut telah menyatakan tugas dari BPKAD yaitu melaksanakan penganggaran, mengelola keuangan daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Tugas tersebut juga tidak lepas dari sistem akuntansi keuangan daerah, mulai dari pencatatan sampai pelaporan serta pertanggungjawaban agar terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, inovatif dan akuntabel. Hal itu menyatakan bahwa BPKAD Pemkab Bojonegoro menjadi objek dan responden pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan meneliti mengenai aspek keperilakuan dalam psikologi dan psikologi sosial dengan menggunakan variabel independen sikap, motivasi, emosi, persepsi, dan kepribadian pada pegawai instansi daerah. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bojonegoro Jawa Timur yaitu membantu meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai sehingga dapat mengelola sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik dan benar sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul “Pengaruh Aspek Keperilakuan Organisasi terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Bojonegoro Jawa Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur?
2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur?
3. Apakah emosi berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur?
4. Apakah persepsi berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur?
5. Apakah kepribadian berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh emosi terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepribadian terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di BPKAD Pemkab Bojonegoro Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan bahwa aspek berperilaku organisasi dapat memberikan manfaat untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan sistem. Sistem tersebut berupa sistem akuntansi daerah yang dilakukan dengan transparansi, efektif, efisien, dan akuntabilitas serta konsep-konsep tentang pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Bojonegoro Jawa Timur.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan sebuah informasi sekaligus menambah pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan pengaruh aspek berperilaku dari segi psikologi dan psikologi sosial terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis ada juga manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, khususnya dibidang akuntansi sektor publik mengenai pengaruh sikap, motivasi, emosi, persepsi dan kepribadian terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Sekaligus dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Bagi BPKAD Pemkab Bojonegoro

Memahami aspek keperilakuan pegawai, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan strategi dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang untuk mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).